

# Pengaruh Variabel Ekonomi dan Variabel Sosial Terhadap Tingkat Kemiskinan Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2013 – 2017

Henny Setiani

Program Pascasarjana Magister Manajemen  
Universitas Lampung

---

**Abstrak** : Bagi sebagian besar masyarakat, kemiskinan seolah menjadi sebuah belenggu, dan sulit untuk dapat keluar atau lepas dari belenggu tersebut. Berdasarkan data indeks kemiskinan nasional yang dikeluarkan oleh BPS, Provinsi Lampung dalam kurun waktu 5 tahun terakhir masih berada di atas kemiskinan nasional. Penelitian ini menganalisis pengaruh variabel ekonomi dan variabel sosial terhadap indeks kemiskinan pada tingkat kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Variabel ekonomi terdiri dari alokasi anggaran belanja pemerintah daerah dan pendapatan rata-rata per kapita, sedangkan variabel sosial terdiri dari rata-rata lama sekolah dan angka harapan hidup. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan Regresi Data Panel dengan metode *fixed effect*. Hasilnya menunjukkan bahwa alokasi anggaran belanja daerah bidang kesehatan, pendapatan rata-rata per kapita, dan rata-rata lama sekolah memiliki arah yang negatif dan berpengaruh signifikan dalam menurunkan indeks kemiskinan di kabupaten/kota di Provinsi Lampung pada periode penelitian tahun 2013-2017. Sedangkan alokasi anggaran belanja bidang pendidikan dan angka harapan hidup tidak memiliki pengaruh signifikan dalam menurunkan kemiskinan. Meskipun demikian, kedua variabel ini memiliki arah yang negatif juga. Variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 97%. Sedangkan sisanya 3% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar model dalam penelitian

**Key words:** indeks kemiskinan, belanja pemerintah daerah, pendapatan rata-rata per kapita, rata-rata lama sekolah, dan angka harapan hidup.

---

## PENDAHULUAN

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan perekonomian suatu negara adalah berkurangnya jumlah penduduk miskin. Kemiskinan menjadi problem mendasar yang selalu mengiringi sejarah pembangunan bangsa-bangsa di dunia, terutama di negara berkembang termasuk Indonesia. Seolah tidak akan pernah selesai, kemiskinan di Indonesia dari tahun ke tahun tidak mengalami penurunan yang signifikan. Bagi sebagian besar masyarakat, kemiskinan seolah menjadi sebuah

belenggu, dan sulit untuk dapat keluar atau lepas dari belenggu tersebut. Belenggu kemiskinan dikenal juga dengan lingkaran "setan" kemiskinan yang tidak berujung pangkal, dimana banyak penduduk pedesaan terperangkap dalam lingkaran tersebut. Lingkaran tersebut mencakup pendapatan yang rendah, tabungan yang rendah, dan produktifitas yang rendah juga. Berdasarkan data indeks kemiskinan nasional yang dikeluarkan oleh BPS, Provinsi Lampung dalam kurun waktu 5 tahun terakhir masih berada di atas kemiskinan nasional. Provinsi Lampung juga menempati urutan ketiga atau

keempat tertinggi untuk kemiskinan di Pulau Sumatera. Berikut ini perbandingan data kemiskinan di Provinsi Lampung dengan kemiskinan nasional tahun 2013 s.d 2017:

**Tabel 1. Indeks Kemiskinan Nasional dan Provinsi Lampung**

No	Tahun	Nasional (%)	Lampung (%)
1	2013	11,47	14,39
2	2014	10,96	14,21
3	2015	11,13	14,35
4	2016	10,70	14,29
5	2017	10,12	13,69

Dalam kurun waktu 5 tahun, pemerintah daerah sendiri telah melakukan kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pembukaan lapangan pekerjaan;
2. Menggratiskan dan memajukan pendidikan. Alokasi anggaran di bidang pendidikan mengalami peningkatan setiap tahunnya, dan mengambil porsi paling besar dari total anggaran pengeluaran;
3. Menggratiskan fasilitas kesehatan. Alokasi anggaran di bidang kesehatan juga mengalami peningkatan setiap tahunnya, dan menjadi pos pengeluaran nomor 2 terbesar setelah bidang pendidikan;
4. Pemberian modal gratis bagi usaha rakyat miskin, dll.

Permasalahan kemiskinan juga perlu ditinjau dari sistem sosial masyarakat secara keseluruhan dalam masyarakat tersebut. Sistem sosial yang dimaksud adalah hubungan antara faktor-faktor yang meliputi sikap dan perilaku masyarakat dalam menghadapi masalah kehidupan dan bekerja, birokrasi pemerintah, pola pertalian keluarga, agama dan adat istiadat di lingkungan mereka. Faktor-faktor sosial

yang turut berpengaruh terhadap tingginya angka kemiskinan antara lain faktor pertumbuhan ekonomi, pendidikan yang terlampaui rendah, keterbatasan sumber alam, beban keluarga dll.

Pada penelitian ini, peneliti ingin melihat bagaimana variabel ekonomi dan variabel sosial berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2013 - 2017. Variabel ekonomi terdiri dari alokasi anggaran belanja daerah pemerintah daerah bidang pendidikan dan kesehatan serta pendapatan rata-rata per kapita. Sedangkan variabel sosial antara lain rata - rata lama sekolah dan angka harapan hidup.

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk menganalisis:

1. Sejauh mana alokasi belanja daerah bidang pendidikan berpengaruh menurunkan indeks kemiskinan;
2. Sejauh mana alokasi belanja daerah bidang kesehatan berpengaruh menurunkan indeks kemiskinan;
3. Sejauh mana pendapatan rata-rata per kapita (PDRB per kapita) berpengaruh menurunkan indeks kemiskinan;
4. Sejauh mana rata-rata lama sekolah berpengaruh menurunkan indeks kemiskinan;
5. Sejauh mana angka harapan hidup berpengaruh menurunkan indeks kemiskinan.

Manfaat yang akan diperoleh sesudah dilakukan penelitian adalah:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk memperluas wawasan teori *human capital* yaitu mengenai manusia (*human*) bukan sekedar sumber daya namun merupakan modal (*capital*) yang di masa

akan datang dapat menghasilkan pengembalian (*return*) dalam rangka mengembangkan kualitas dan kuantitas manusia tersebut. Manusia yang berkualitas diharapkan mampu keluar dari rantai belenggu kemiskinan. Peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung hasil penelitian-penelitian sebelumnya.

2. Secara praktis untuk memberikan kontribusi berupa informasi kepada pemerintah daerah sekaligus sebagai referensi menentukan strategi yang tepat dalam menyusun prioritas kebijakan anggaran dan mengefektifkan implementasinya agar menunjang keberhasilan penurunan angka kemiskinan di daerahnya.

### **METODOLOGI**

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diambil dari dokumen resmi yang dikeluarkan oleh BPS dan Pemerintah Kabupaten. Data tersebut berupa:

- Data kemiskinan Tahun 2013 - 2017 yang diambil dari data Presentase Penduduk

Miskin menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Lampung yang diperoleh dari website BPS Lampung;

- Alokasi anggaran belanja daerah bidang pendidikan dan kesehatan yang dikutip dari Penjabaran APBD Perubahan (APBD-P) TA 2012 - 2016. Pengaruh belanja daerah terhadap kemiskinan tidak langsung dapat dilihat hasilnya, melainkan memerlukan waktu (*time lag*). Data anggaran belanja yang digunakan lebih lambat satu tahun dari data kemiskinan untuk mendapatkan hasil penelitian yang paling mendekati valid.
- Data PDRB Per kapita 2013 - 2017;
- Rata - Rata Lama Sekolah Tahun 2013 - 2017;
- Angka Harapan Hidup Tahun 2013 - 2017.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi untuk mengetahui tingkat signifikansi dari masing-masing koefisien regresi variabel independen terhadap variabel dependen

### **PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa model *fixed effect* lolos uji asumsi klasik. Selanjutnya akan dilakukan pengujian hipotesis. Berikut hasil pengujian hipotesis dengan model *fixed effect*.

**Tabel 2. Hasil Pengujian Hipotesis**

Dependent Variable: Kemiskinan				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4,177	5,002	0,835	0,408
Pendidikan	-0,032	0,074	-0,439	0,663
Kesehatan	-1,123	0,216	-5,185	0,000
PDRB Per kapita	-0,010	0,005	-1,988	0,053
Rata-rata Lama Sekolah	-0,024	0,008	-2,864	0,006
Angka Harapan Hidup	-0,271	1,182	-0,229	0,820
<i>Fixed Effects (Cross)</i>				
LAMPUNG BARAT - C	0,077			
LAMPUNG TIMUR - C	0,234			
LAMPUNG TENGAH - C	-0,023			
LAMPUNG UTARA - C	0,543			
LAMPUNG SELATAN - C	0,220			
PRINGSEWU - C	-0,207			
TANGGAMUS - C	0,031			
WAY KANAN - C	0,079			
MESUJI - C	-0,419			
TULANG BAWANG - C	-0,324			
BANDAR LAMPUNG - C	-0,131			
METRO - C	-0,080			
R-squared	0,983			
Adjusted R-squared	0,977			
S.E. of regression	0,058			
F-statistic	159,521			
Prob(F-statistic)	0,000			

Berdasarkan tabel 2, diketahui nilai R-squared sebesar 97,7%, nilai ini menunjukkan proporsi kemampuan semua variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat, sedangkan sisanya sebesar 2,3% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model. Berikut hasil pengujian hipotesis secara individual.

a. Hipotesis pertama

Ho : Alokasi belanja daerah untuk pendidikan di Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tidak berpengaruh signifikan dalam menurunkan indeks kemiskinan

Ha : Alokasi belanja daerah untuk pendidikan di Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung berpengaruh signifikan dalam menurunkan indeks kemiskinan

Berdasarkan tabel 2, diperoleh hasil berupa nilai probabilitas pendidikan 0,663 > 0,10 artinya signifikansi secara statistik menerima Ho dan tidak menerima Ha yang berarti bahwa alokasi belanja daerah untuk pendidikan di Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tidak berpengaruh signifikan dalam menurunkan indeks kemiskinan di masing-masing daerahnya.

b. Hipotesis kedua

Ho : Alokasi belanja daerah untuk kesehatan masyarakat di Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks kemiskinan

Ha : Alokasi belanja daerah untuk kesehatan masyarakat di Kabupaten di Provinsi Lampung berpengaruh signifikan terhadap indeks kemiskinan

Berdasarkan tabel 2, diperoleh hasil berupa nilai probabilitas kesehatan  $0,000 < 0,10$  artinya signifikansi secara statistik tidak menerima Ho atau alokasi belanja daerah untuk kesehatan masyarakat di Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung berpengaruh signifikan terhadap indeks kemiskinan. Arah yang negatif, menunjukkan alokasi belanja daerah untuk kesehatan masyarakat dapat menurunkan indeks kemiskinan di Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

c. Hipotesis ketiga

Ho : PDRB Per kapita di Kabupaten di Provinsi Lampung tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks kemiskinan

Ha : PDRB Per kapita di Kabupaten di Provinsi Lampung berpengaruh signifikan terhadap indeks kemiskinan

Berdasarkan tabel 2, diperoleh hasil berupa nilai probabilitas pendidikan  $0,053 < 0,10$  artinya signifikansi secara statistik menerima Ho dan tidak menerima Ha atau PDRB Per kapita di Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung berpengaruh signifikan dalam menurunkan indeks kemiskinan.

d. Hipotesis ke empat

Ho : Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks kemiskinan

Ha : Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung berpengaruh signifikan terhadap indeks kemiskinan

Berdasarkan tabel 4.10 diperoleh hasil berupa nilai probabilitas yang lebih kecil dari taraf signifikansi ( $0,006 < 0,10$ ), artinya tidak menerima Ho atau rata-rata lama sekolah di Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung berpengaruh signifikan menurunkan indeks kemiskinan, pengaruhnya adalah negatif, dengan kata lain rata-rata lama sekolah dapat menurunkan indeks kemiskinan di Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

e. Hipotesis ke lima

Ho : Angka harapan hidup di Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks kemiskinan

Ha : Angka harapan hidup di Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung berpengaruh signifikan terhadap indeks kemiskinan

Berdasarkan tabel 4.10 diperoleh hasil berupa nilai probabilitas yang lebih kecil dari taraf signifikansi ( $0,820 > 0,10$ ), artinya menerima Ho atau angka harapan hidup di Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks kemiskinan, arah hubungannya adalah negatif, dengan kata lain angka harapan hidup dapat menurunkan indeks kemiskinan di Provinsi Lampung, namun tidak signifikan.

Model yang terbentuk pada penelitian ini membentuk persamaan regresi data panel sebagai berikut:

$$\text{Kemiskinan (Yt)} = 4,177 - 0,032.\text{Pendt-1} - 1,123.\text{Kest-1} - 0,010\text{PDRBt} - 0,024\text{RLSt} - 0,271\text{AHHt} + e.$$

Koefisien alokasi anggaran belanja bidang kesehatan adalah yang terbesar, ini menunjukkan bahwa belanja kesehatan mempunyai pengaruh langsung atau daya ungkit paling besar untuk menurunkan persentase penduduk miskin dan mengangkatnya dari garis kemiskinan. Alokasi belanja untuk kesehatan masyarakat sendiri ditujukan untuk membiayai kegiatan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan, upaya peningkatan kesehatan masyarakat, penanggulangan penyakit menular, pelayanan kesehatan masyarakat miskin, dan peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak.

Alokasi anggaran belanja daerah untuk pendidikan pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Namun arah penelitian adalah negatif, hal ini sejalan dengan teori Becker. Dalam jangka pendek, bantuan pemerintah untuk pendidikan ini belum mampu memutuskan rantai kemiskinan, namun diharapkan secara jangka panjang adanya bantuan atau pendidikan formal gratis ini mampu mengeluarkan seseorang dari kemiskinan.

PDRB per kapita secara statistik berpengaruh signifikan dan negatif terhadap indeks kemiskinan di 12 Kabupaten/ Kota di Provinsi Lampung, sesuai dengan teori Todaro dan Smith (2006), yang mengatakan bahwa tinggi rendahnya tingkat kemiskinan di suatu daerah tergantung pada dua faktor utama,

yaitu salah satunya tingkat pendapatan nasional rata-rata yang artinya adalah semakin tinggi pendapatan daerah dapat mengakibatkan ttingkat kemiskinan semakin menurun.

Rata-rata Lama Sekolah secara statistik berpengaruh signifikan dan negatif terhadap indeks kemiskinan di 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, sesuai dengan teori Todaro (2000), yang mengatakan bahwa tingkat penghasilan sangat dipengaruhi oleh lamanya seseorang memperoleh pendidikan. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan teori *Human Capital* menurut Becker, bahwa manusia bukan sekedar sumber daya namun merupakan modal (*capital*) yang menghasilkan pengembalian (*return*) dan setiap pengeluaran yang dilakukan dalam rangka mengembangkan kualitas dan kuantitas modal tersebut merupakan kegiatan investasi.

Angka Harapan Hidup secara statistik tidak signifikan terhadap indeks kemiskinan di 12 Kabupaten/ Kota di Provinsi Lampung. Namun, hasil penelitian menunjukkan arah yang negatif, hal ini sejalan dengan pendapat Faturohim (2011), yang mengatakan bahwa di negara-negara yang tingkat kesehatannya lebih baik, setiap individu memiliki rata-rata hidup lebih lama. Secara ekonomis mempunyai peluang untuk memperoleh pendapatan lebih tinggi dan cenderung menginvestasikan pendapatannya di bidang pendidikan dan menabung.

## PENUTUP

### Simpulan

1. Alokasi anggaran kesehatan pemerintah daerah menjadi variabel yang berpengaruh paling signifikan secara statistik menurunkan indeks kemiskinan di Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung;
2. Selanjutnya diikuti variabel rata - rata lama sekolah dan PDRB per kapita. Rata - rata lama sekolah penduduk di Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung sangat rendah yaitu 7-8 tahun atau tidak tamat SLTP. Hal ini menjadi salah satu faktor tingginya indeks kemiskinan di Provinsi Lampung;
3. Untuk menurunkan indeks kemiskinan, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan PDRB per kapita, disertai dengan upaya menekan atau memperkecil laju pertumbuhan penduduk dengan menggunakan program Keluarga Berencana.
4. Alokasi anggaran pendidikan secara statistik menunjukkan arah yang negatif tetapi tidak signifikan. Begitu juga dengan angka harapan hidup. Angka harapan hidup yang tinggi di Provinsi Lampung secara statistik belum mampu mengangkat masyarakat keluar dari kemiskinan.masyarakat

### Saran

1. Pemerintah daerah harus aktif menjangring permasalahan - permasalahan kemiskinan di daerahnya masing-masing, sehingga program - program dan penggunaan anggaran belanjanya tepat tujuan serta mampu menurunkan jumlah penduduk miskin di daerahnya;
2. Untuk menurunkan indeks kemiskinan, pemerintah daerah diharapkan tidak hanya mengupayakan program-program untuk mengurangi jumlah penduduk miskin saja, melainkan juga program

untuk menekan laju pertumbuhan penduduk;

3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel atau pendekatan lain seperti pengembangan UMKM, program penyediaan lapangan kerja, dll.

## DAFTAR PUSTKA

- Agus Iman Solihin. (1995). *Investasi Modal Manusia Melalui Pendidikan: Pentingnya Peran Pemerintah*. Mini Economica 23, Jakarta, Hlm. : 6-20.
- Ani, N.L.N.P. & Dwiranda, A.A.N.B. (2014). *Jurnal : Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah pada Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan Kabupaten dan Kota*. ISSN: 2302-8556. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 6.3 (481-497).
- Hendra, Roy. (2010). *Tesis: Determinan Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Kristianto, Lilik. (2010). *Tesis: Sinerji Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Kota Surakarta*. Universitas Sebelas Maret.
- Mulyanto. *Makalah: Analisis Faktor Penyebab dan Karakteristik Model Pengentasan Kemiskinan di Kota Surakarta*. STIE AUB Surakarta.
- Penjabaran APBD-P Kabupaten Lampung Tengah TA 2012-2015
- Penjabaran APBD-P Kabupaten Lampung Timur TA 2012-2015
- Penjabaran APBD-P Kabupaten Lampung Utara TA 2012-2015
- Penjabaran APBD-P Kabupaten Lampung Barat TA 2012-2015
- Penjabaran APBD-P Kabupaten Lampung Selatan TA 2012-2015
- Penjabaran APBD-P Kabupaten Mesuji TA 2012-2015

Penjabaran APBD-P Kabupaten Way Kanan  
TA 2012-2015

Penjabaran APBD-P Kabupaten Tanggamus  
TA 2012-2015

Penjabaran APBD-P Kabupaten Pringsewu  
TA 2012-2015

Santoso, Lukman Adi (2011). Tesis :  
*Pengaruh PNPM dan Alokasi Belanja  
Daerah Bidang Pendidikan,  
Kesehatan, dan Pekerjaan Umum  
Terhadap Penanggulangan  
Kemiskinan (Studi Kasus  
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa  
Timur Tahun 2007 - 2009)*. Fakultas  
Ekonomi Universitas Indonesia.

Desi Tambunan. (2013). Makalah : *Human  
Capital dan Produktifitas*.

Wahyudi (2011). Tesis : *Pengaruh Alokasi  
Belanja Daerah Bidang Pendidikan,  
Kesehatan, dan Pekerjaan Umum  
Terhadap Penanggulangan  
Kemiskinan (Studi Kasus  
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa  
Tengah Tahun 2007 - 2009)*. Fakultas  
Ekonomi Universitas Indonesia.

[www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)